

# SIASAT ANAK JALANAN MELAWAN PRAKTIK OPRESIF DI MAKASSAR<sup>1</sup>

## STREET CHILDREN'S TACTICS AGAINST OPPRESSIVE PRACTICES IN MAKASSAR

Abu Bakar

Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, UIN Alauddin Makassar  
aboe.aboe09@gmail.com

### Abstract

*This paper discusses the problems of street children lives in Makassar City, focusing on their motivation and resistance against oppressive practices in their environments. The main question is how street children establish tactics against oppressive practices. Using Scott's theory of resistance in daily life as well as ethnographic approach, this paper underlines that street children's tactics against oppressive practices are determined by their economical subsistence. They are motivated to escape from their subsistence crisis.*

**Keywords:** *tactics, oppressive practices, resistance, street children, resistance motivation*

### Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan masalah kehidupan anak jalanan di Kota Makassar, dengan fokus pada motivasi dan resistensinya dalam menghadapi praktik-praktik opresif di sekelilingnya. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana siasat anak jalanan dalam melawan praktik-praktik opresif. Untuk menggambarkannya, penulis menggunakan teori perlawanan sehari-hari James C. Scott dan pendekatan etnografi. Siasat anak jalanan dalam melawan praktik opresif ternyata didasarkan pada masalah subsistensi (ekonomi). Motivasi mendasar dari anak jalanan adalah keluar dari krisis subsistensi.

**Kata kunci:** siasat, praktik opresif, resistensi, anak jalanan, motivasi resistensi

### Latar Belakang

Sejak dulu Makassar sudah dikenal sebagai salah satu kota penting dalam perdagangan internasional. Ini dikarenakan letaknya yang strategis dan posisinya sebagai pintu gerbang menuju Indonesia bagian timur, seperti Ambon, Ternate, dan Papua. Karena itu, perkembangan Makassar menjadi daya tarik bagi masyarakat di berbagai daerah sehingga mendorong tingginya tingkat urbanisasi.

Kejayaan Makassar di masa lalu sebagai kota niaga internasional menumbuhkan rasa

optimisme dan keinginan untuk mengulang sejarahnya. Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (2004-2014) yang mencanangkan *Makassar Menuju Kota Dunia* merupakan harapan kembalinya Makassar dalam lalu lintas perdagangan internasional. *Makassar Menuju Kota Dunia* merupakan visi kota yang melandasi arah kebijakan Pemerintah Kota Makassar sampai hari ini. Namun, persoalan baru adalah masalah sosial sebagai konsekuensi tingginya tingkat urbanisasi, seperti pengangguran, kemiskinan, pelacuran, kenakalan remaja, gelandangan dan kejahatan. Oleh karena itu, visi kota *Makassar Menuju Kota Dunia* tidak hanya bagaimana Makassar dikenal dunia internasional, tetapi bagaimana masalah sosial dibenahi, termasuk keberadaan anak jalanan.

Kota Makassar sebagaimana kota lainnya di Indonesia, juga mengalami hal yang sama terkait menjamurnya anak jalanan di sudut-sudut kota. Makassar yang tumbuh pesat di kawasan timur Indonesia, menjadi magnet bagi masyarakat

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan pengembangan dari tesis penulis yang berjudul *Melawan Opresif (Studi Anak Jalanan Makassar)* pada Program S2 Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 2015.

<sup>2</sup> Tulisan ini merupakan pengembangan dari tesis penulis yang berjudul *Melawan Opresif (Studi Anak Jalanan Makassar)* pada Program S2 Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 2015.

di daerah-daerah sekitar Makassar, sehingga mendorong terjadinya migrasi dan tingginya mobilisasi penduduk. Keterbatasan lapangan kerja menyebabkan tumbuhnya masyarakat urban yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Ini disebabkan oleh keahlian mereka yang tidak memadai untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal.

Menjamurnya anak jalanan mendorong pemerintah Kota Makassar mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi keberadaannya. Dalam angka statistik, jumlah anak jalanan di Makassar setiap tahunnya mengalami peningkatan<sup>3</sup>, yakni mulai tahun 2008 sampai tahun 2013. Fenomena ini jika tidak ditangani secara baik, maka sangat mungkin di tahun-tahun mendatang jumlah anak jalanan semakin bertambah.

Studi tentang anak jalanan di Indonesia boleh dikatakan sudah cukup lama seiring dengan berkembangnya studi-studi tentang kemiskinan dan pembangunan di perkotaan. Hanya saja, dari penelitian selama ini kebanyakan fokus pada keberadaan anak jalanan sebagai penyandang masalah sosial daripada aspek lainnya. Perkembangan studi tentang anak jalanan dapat dilihat dalam tiga periode; *Pertama*, sebelum 1980 kehadiran anak jalanan dianggap sebagai gejala sosial biasa dan belum perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat secara serius. *Kedua*, periode 1981-1990, kehadiran anak jalanan yang populasinya semakin banyak dianggap sebagai gejala sosial anak yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, sehingga perlu ditangani dan dibina dalam suatu panti. *Ketiga*, tahap 1991-selanjutnya, setelah melalui kebijakan penangkapan tetapi justru populasinya semakin bertambah, disikapi dalam bentuk pendampingan (Surjono, 2000: 116-117).

Dalam rentang waktu di atas, studi selama ini hanya fokus pada dua pendekatan dalam memahami anak jalanan dan kemiskinan di perkotaan, yakni pendekatan budaya kemiskinan dan kemiskinan struktural (Ghofur, 2009: 4-5). Pendekatan budaya kemiskinan sangat dipengaruhi oleh Oscar Lewis (1988) yang memandang bahwa kebudayaan menyebabkan sekaligus memantapkan

---

<sup>3</sup> Jumlah anak jalanan di Kota Makassar dari tahun ke tahun: tahun 2008: 869 orang; 2009: 870 orang; 2010: 901 orang; 2011: 918 orang; 2012: 990 orang; 2013: 1043 orang. Data ini menunjukkan pertambahan jumlah anak jalanan di Kota Makassar dalam rentang waktu dari tahun 2008-2013. Data ini bersumber dari Dinas Sosial Kota Makassar.

kemiskinan. Sementara itu, cara pandang struktural berpendapat bahwa struktur sosial memantapkan kemiskinan. Tekanan-tekanan struktural, seperti tekanan politik dan ekonomi mengakibatkan sejumlah orang dalam populasi terdorong ke posisi yang tidak menguntungkan.

Tulisan ini tidak mempersoalkan pendekatan di atas, apakah kemiskinan merupakan kebudayaan bagi anak jalanan atau justru kemiskinannya berasal dari struktural yang dominan. Tulisan ini hanya menekankan bagaimana reaksi anak jalanan sebagai kelompok miskin, dalam menyikapi tekanan (opresif) dari luar dirinya. Salah satu contohnya adalah kasus anak jalanan yang mereposisi diri menjadi Jubeti<sup>4</sup> di Makassar. Sekalipun negara yang wataknya koersif dan opresif, telah memaksa anak jalanan meninggalkan lampu merah dengan menggunakan instrumen pemaksa berupa regulasi (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar), ditambah cara-cara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terbilang keras untuk memaksa anak jalanan agar sedapat mungkin dan sesegera untuk diinstitusionalisasi, nyatanya tidak memuaskan. Anak jalanan tetap eksis dan melakukan aktivitas ekonomi walaupun cara yang ditempuh sama sekali berbeda dengan sebelumnya.

Pembangkangan simbolik anak jalanan bekerja dalam berbagai bentuk, selain pada level aksi, dari segi pengetahuan mereka juga melakukan hal yang sama. Menolak klaim (*stereotype*) struktur sosial yang ada. Anak jalanan sering dianggap kotor, bodoh, tidak berpendidikan, jahat dan sebagainya yang berbau negatif. Mereka menolak pengklaiman sebagaimana studi yang dilakukan oleh Marquez (dalam Ertanto, 2000) mengenai kaum muda jalanan di Caracas. Ia menunjukkan bahwa anak muda tidak secara pasif menerima begitu saja pandangan negatif dari luar. Jalan raya bukanlah sekedar tempat untuk bertahan hidup. Bagi kaum muda, jalanan adalah arena untuk menciptakan satu organisasi sosial, akumulasi pengetahuan dan rumusan strategi untuk keberadaan eksistensinya. Artinya mereka juga berupaya melakukan penghindaran atau melawan pengontrolan dari pihak lain. Bahkan anak jalanan Accra menolak penyebutan "*kaya Boila*", karena dianggap

---

<sup>4</sup> Dalam studi ini penyebutan untuk Pak Ogah cilik menggunakan istilah Jubeti, sedangkan bagi orang dewasa disebut dengan Pak Ogah.

penghinaan dan sarat makna marginalisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Shanahan (2003) dalam tulisannya yang menyorot anak jalanan di Accra, Ghana. Bahkan penyebutan *kaya Boila* dilawan dengan menggunakan fisik.

Kurangnya – bahkan penulis belum menemukan tulisan tentang anak jalanan di Makassar yang membicarakan masalah resistensi – studi tentang resistensi anak jalanan terhadap praktik opresif, menjadikannya menarik diteliti untuk memahami apa motivasi resistensinya dan bagaimana mereka bertahan hidup di tengah tekanan yang mereka hadapi. Oleh karenanya studi ini di fokuskan dan berposisi untuk mengisi kekurangan literatur yang ada (jika tidak ingin disebut kekosongan).

Untuk memfokuskan, tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan umum yakni: bagaimana strategi/siasat anak jalanan ketika melawan praktik opresif? Tulisan ini bermaksud menjelaskan resistensi anak jalanan ketika menghadapi praktik opresif yang dilakukan oleh negara dan orang-orang (raja-raja) jalanan. Selain itu, tulisan ini juga menggambarkan kondisi yang melatarbelakangi perlawanan anak jalanan. Pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki fenomena resistensi anak jalanan di Makassar adalah kualitatif dengan desain etnografi. Pendekatan kualitatif dapat membantu memahami secara lebih mendalam dan menginterpretasi apa yang ada di balik peristiwa-peristiwa, latar belakang, pemikiran anak jalanan yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana mereka meletakkan makna pada peristiwa yang terjadi. Etnografi diartikan sebagai paparan deskripsi detail yang holistik dengan berbasiskan penelitian lapangan yang intensif.

### **Sebuah Refleksi: Perjuangan Orang-Orang Pinggiran**

Hadirnya orang-orang pinggiran tidak lain merupakan sengitnya pertarungan kepentingan di ranah sosial. Orang-orang ini kebanyakan dari kelompok yang tidak mampu mengartikulasikan kepentingannya dan terutama tidak memiliki modal ekonomi maupun modal sosial yang memadai. Di dunia perkotaan, lahirnya orang pinggiran diakibatkan oleh pesatnya pembangunan dan proses industrialisasi yang tidak mengakomodasi mereka. Di sisi lain, proses industrialisasi di perkotaan menjadi penggoda terjadinya urbanisasi dari desa ke kota. Yang tidak dapat menyesuaikan diri kebanyakan menjadi warga miskin kota atau

orang-orang pinggiran, baik sebagai gelandangan maupun sebagai pengemis.

Alkostar (1984: 120-121) dalam penelitiannya tentang gelandangan di Makassar dan Yogyakarta menarik kesimpulan bahwa kemunculan gelandangan atau pengemis (orang pinggiran) setidaknya ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih kepada sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, dan mental yang tidak kuat, serta adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sementara itu, faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama, dan letak geografis. Intinya bahwa orang pinggiran ini dalam kesadaran mereka menjadi kewajaran (terpaksa) untuk menggelandang berdasarkan kondisi yang sedang dihadapi. Ghofur (2009:53) mengatakan lain, bahwa menggelandang bukan merupakan keadaan terpaksa yang disebabkan oleh keterbatasan akan tetapi lebih jauh dari itu, menggelandang dianggap sebagai pilihan hidup yang memuat ekspresi kebebasan.

Sejalan dengan Ghofur (2009), Dewa (2002) dalam penelitiannya tentang anak jalanan di Yogyakarta juga mengemukakan hal yang sama. Menjadi anak jalanan yang berjarak dengan orang tua dan warga kota kebanyakan merupakan pilihan hidup yang terlakoni. Karena dengan hidup bebas, makna tentang kebebasan menemukan bentuknya. Pilihan hidup demikian beranjak dari proses yang panjang sampai pada pembentukan pemahaman akan nilai-nilai yang berlaku bagi kelompoknya. Nilai-nilai ini kemudian mengikat dan menjadi kesepakatan bersama (Beazley, 2003). Gaya hidup (kebebasan) orang pinggiran ini dengan sendirinya menciptakan garis demarkasi dengan warga kota lainnya.

Situasi ini memancing reaksi pemerintah dan warga kota. Ini disebabkan karena persepsi tentang “hidup ideal” didominasi oleh rezim. Karena itu, pola hidup bebas orang pinggiran menjadi negasi bagi wacana yang dibangun oleh struktur (rezim). Mengacu pada Haryatmoko (2010), bahwa praksis sosial itu diskursif. Di mana kehidupan sosial tidak lepas dari kontestasi wacana dan diorganisir oleh nilai-nilai yang dikonstruksi berdasarkan kebutuhan manusia, hingga akhirnya wacana rezim tentang “hidup ideal” mendominasi seluruh tata nilai mayoritas warga kota. Dalam konstruksi sosial, menurut Haryatmoko (2010: 136), kecenderungan umum yang terjadi adalah lebih idealis dari pada realis.

Makanya yang ideal lebih banyak menentukan tindakan ketimbang realitas apa yang terjadi.

Tulisan Saya Sasaki Shiraishi (2009) salah satu contoh bagaimana gaya hidup orang-orang pinggiran yang tinggal di jalanan dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Shiraishi melanjutkan bahwa persepsi yang memonopoli wacana hari ini adalah bahwa orang pinggiran terutama anak-anak yang tumbuh dan besar di luar dari jaringan keluarga dianggap sebagai sesuatu yang tidak patut dan menyalahi definisi keluarga yang ideal. Sebaliknya, bagi mereka hidup di jalanan bukanlah sekedar tempat untuk bertahan hidup, bagi mereka jalanan adalah arena untuk menciptakan satu organisasi sosial, akumulasi pengetahuan dan rumusan strategi untuk keberadaan eksistensinya (Marquez dalam Ertanto, 2000). Dalam konteks Indonesia, Shiraishi (2009) menjelaskan bahwa fenomena demikian tidak lepas dari wacana yang dibangun di masa Orde Baru, tentang keluarga sejahtera dan bahagia. Kehidupan keluarga Soeharto menjadi rujukan dan Soeharto sebagai “Bapak” menjadi keharusan bagi “Anak” mencontoh kehidupan ideal keluarga Soeharto.

Dewasa ini, dari kaca mata pemerintah kota, kehadiran mereka (orang terpinggirkan) dengan penampilan yang kumal dipandang sebagai upaya pengotoran kota dan sekaligus penyebaran bibit perilaku kriminal yang dapat merusak tatanan yang berlaku. Oleh karenanya, mereka dianggap tidak layak untuk tinggal di kota dan harus disingkirkan agar tidak mengganggu keindahan dan tatanan kota. Aparat pemerintah pun kemudian melakukan upaya koersif (razia). Dari sudut pandang aparat pemerintah, razia atau penertiban sosial diyakini merupakan cara yang paling jitu untuk membersihkan kota dari gelandangan atau orang jalanan (Ghofur, 2009: 54).

Razia dilakukan berdasarkan otoritas yang tidak lain adalah representasi dari kepentingan kelas dominan (mengikuti logika Marx). Meminjam istilah Goffman, pada fase ini adalah fase di mana negara melakukan upaya “institusionalisasi” (Jones, 2010: 150). Kelas bawah (orang pinggiran) dijebak dengan upaya koersif lalu digiring ke dalam ruang isolasi agar dibersihkan (rehabilitasi).

Dalam proses institusionalisasi, pengaturan kehidupan benar-benar dirancang untuk mengganti citra diri yang ada dengan yang baru, yang lebih dapat diterima oleh institusi. Institusi total ini

dipahami sebagai tempat-tempat tinggal dan bekerja di mana sejumlah orang yang dikondisikan sama dipisahkan dari masyarakat yang lebih luas untuk waktu yang cukup lama, bersama-sama menjalani kehidupan yang diatur secara formal berdasarkan jadwal-jadwal yang ketat. Pemberdayaan orang pinggiran, terutama anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah bagian dari bentuk ini. Anak jalanan yang terstigmatisasi akan dinormalisasi sesuai kaidah yang digunakan oleh Dinas Sosial. Setelah melalui proses, anak jalanan akan digiring untuk sedapat mungkin bersosialisasi dalam dunia sosial dengan citra diri yang ternormalisasi.

Cara kerja negara dalam proses penanganan anak jalanan dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari penerbitan peraturan daerah (perda), razia sampai kepada upaya hegemonik lewat reproduksi wacana. Stigmatisasi dilakukan untuk membingkai sisi negatif dari anak jalanan. Pemasangan reklame mengenai anak jalanan adalah salah satu cara dalam mengkampanyekan keburukan anak jalanan. Cara ini bekerja secara halus ketimbang razia, namun memiliki dampak yang luas bagi anak jalanan sebagai kelas sosial bawah. Belum lagi ancaman bagi pemberi “sedekah” kepada anak jalanan, pesannya sangat jelas bahwa peminggiran anak jalanan atau kelas bawah ini tidak hanya dilakukan secara langsung pada mereka melainkan menyebar dengan tujuan pemingkaian secara luas dengan menembus segala lapisan kelas sosial yang ada. Hingga menciptakan pengaruh secara kuat kepada semua lapisan bahwa apa yang dipersepsikan selama ini tentang anak jalanan benar adanya.

Apa yang dilakukan oleh negara tidak lain adalah upaya penaklukan terhadap kelas bawah. Proses pendisiplinan berjalan satu arah, karena memang sudah menjadi watak alamiah dari kelas dominan, menyebabkan kecenderungan yang terjadi menempatkan kelas bawah sebagai kelas yang lemah tanpa memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Di sisi lain ketika meninjau konsep marxian, kondisi ini membuka peluang dan sekaligus mempercepat proses terjadinya konflik kelas. Ketika ketimpangan terjadi semakin tajam, maka peluang untuk menggerakkan kelas bawah semakin mudah. Semakin keras penindasan, semakin berpotensi melahirkan pembangkangan atau perlawanan sebagai antitesisnya.

Lalu bagaimana reaksi orang-orang pinggiran ini? Dewa (2002: 177) dalam tulisannya

“*Sosialisasi dan Siasat (Budaya) Anak Jalanan*” mengungkapkan bahwa anak jalanan tidak selamanya diam. Akan tetapi mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan *tubuh* sebagai alat. Penggunaan simbol-simbol pada tubuh (cara berpakaian, tato dan tindik) adalah akumulasi dari sebuah pembangkangan atas tata-nilai yang terbangun secara mapan dan dikonstruksi oleh struktur sosial. Menurut hemat penulis, pembangkangan ini semakin memantapkan proses stigmatisasi yang sedang berlangsung dan mengkonfirmasi bahwa apa yang selama ini distigmakan kepada anak jalanan memang benar adanya.

Hanya saja apa yang ditulis oleh Dewa (2002) tidak mengungkapkan bagaimana taktik-taktik anak jalanan ketika berhadapan dengan negara, terutama saat menghadapi razia. Sehingga apa yang dideskripsikan lebih kepada pembangkangan atas nilai-nilai yang berlaku pada mayoritas masyarakat sekitarnya. Misalnya, penggunaan tubuh sebagai alat pembangkangan sama sekali tidak merubah posisi mereka di hadapan aparat. Mereka tetap saja diberangus tanpa ada upaya frontal untuk menghadang proses razia.

Sementara itu, Ghofur (2009) dalam tulisannya mengenai *Manusia Gerobak* juga memperlihatkan bagaimana orang pinggiran ini menggunakan taktik-taktik agar bertahan hidup di jalanan. Bahwa untuk mempertahankan sumber daya ekonomi, manusia gerobak harus berjibaku dengan negara (aparat) dan masyarakat di sekitarnya. Kehadiran mereka, baik di jalanan maupun di tempat-tempat tertentu dalam melakukan aktifitas ekonomi seringkali dianggap sebagai masalah serius, mengganggu ketertiban dan keamanan. Padahal, pada hakikatnya kehadiran mereka di jalanan tidak lain sebagai bagian dari produk negara yang gagal memberikan kesejahteraan.

Berbeda dengan Dewa (2002), Ghofur (2009) dalam menarasikan tulisannya, memulai dengan cara meletakkan kelas bawah (orang pinggiran) sebagai subjek yang aktif dan rasional. Olehnya itu, tekanan dari kelas dominan tidak hanya diterima begitu saja, tetapi direspon dengan penuh kalkulasi, memanfaatkan jaringan kekerabatan dan belajar dari pengalaman masa lalu mereka sebagai modal dalam membangun strategi. Dengan begitu, kehadiran mereka tidak hanya menjadi objek yang pasif, sekalipun kecenderungannya mereka ditundukkan, dikuasai, dan dipinggirkan oleh kelas dominan. Sebagaimana biasanya, kelas dominan atau struktur dominan

selalu menjaga perangkat sosial yang ada agar nilai-nilai yang diwacanakan tetap menjadi mapan dan tidak tergoyahkan oleh kekuatan lain (kelas bawah). Struktur dominan akan menggunakan berbagai saluran sosialisasi yang dikuasainya, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memberikan pengesahan dan pembenaran serta untuk menanamkan nilai-nilai yang menguntungkan pihak yang berkuasa. Meski begitu, manusia gerobak dengan kapasitas dan kesempatan yang berbeda-beda tetap menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi melalui praktik keseharian (Ghofur, 2009: 34).

Selain itu, manusia gerobak yang digambarkan oleh Ghofur (2009) memanfaatkan jaringannya secara efektif, baik jaringannya dengan kerabat maupun bukan kerabat. Misalnya saja, saat akan dilakukan razia, mereka memanfaatkan informasi yang diberikan oleh aparat. Dari informasi yang didapat memudahkan mereka untuk menghindari dari proses razia, karena biasanya aparat sering menghubungi mereka sebelum diadakan razia. Sekalipun demikian, mereka tetap tidak bisa lepas dari bidikan aparat lainnya. Dalam kacamata aparat, mereka tetap sebagai masalah perkotaan yang harus disingkirkan.

Dari kedua tulisan yang ada, baik Dewa (2002) maupun Ghofur (2009), fokus kajian mereka lebih menekankan pada upaya *survival* dari orang pinggiran dalam menghadapi lingkungan sekitarnya, ketimbang menjelaskan resistensinya kepada negara. Di sinilah letak perbedaan tulisan ini, jika kedua literatur sebelumnya lebih kepada resistensi secara horizontal, tulisan ini akan mencoba menjelaskan resistensi yang bersifat vertikal, yakni ketika anak jalanan berhadapan dengan negara.

Lalu apa yang dapat dipetik dari uraian di atas? *Pertama*, bahwa kehidupan orang pinggiran terutama anak jalanan terlalu didominasi oleh wacana tentang “hidup ideal” sebagaimana diimajinasikan oleh negara. Bahwa anak seharusnya sekolah, menurut pada orang tua dan tidak berkeliaran di jalanan. Cara pandang demikian mempengaruhi seluruh tindakan negara dalam memperlakukan anak jalanan. Razia sampai pada proses institusionalisasi adalah sarana untuk mewujudkan cita-cita tentang hidup ideal. Sekalipun upaya demikian kadangkala tidak berhasil, cara-cara itu tetap saja dilakukan. Contohnya di kota Makassar, dari tahun ke tahun anak jalanan tetap bertambah sekalipun razia telah beberapa

kali dilaksanakan. Dengan demikian, tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka tetap eksis? Bagi anak jalanan, imajinasi tentang hidup ideal terletak pada bagaimana mereka menikmati hidup sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa ada yang menilai tentang kehidupan yang mereka jalani. Studi ini ingin memperlihatkan bahwa apa yang dibayangkan oleh negara tentang hidup ideal bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh anak jalanan. Dari cara pandang yang berbeda ini melahirkan pembangkangan.

*Kedua*, studi selama ini tentang orang pinggiran terutama anak jalanan kebanyakan memposisikan mereka sebagai subjek yang pasif dan tidak dapat melakukan apa-apa yang dapat merubah kehidupan mereka menjadi lebih layak (misalnya Andari, 2013; Suyatna, 2011). Dengan demikian, mengesampingkan potensi anak jalanan dalam mengartikulasikan kepentingan mereka dan cara mereka membangun strategi untuk bertahan di jalanan.

Studi ini akan menunjukkan bahwa apa yang dibayangkan selama ini sangat keliru. Anak jalanan yang dianggap lemah dan tidak memiliki masa depan yang jelas justru memiliki pengetahuan yang memungkinkan mereka tetap eksis di jalanan. Berbagai taktik digunakan, baik yang berpusat pada tubuh ataupun aspek di luar dirinya dimanfaatkan untuk mencapai tujuan mereka terutama menyangkut keamanan subsistensi diri dan keluarganya.

Sekalipun stigmatisasi yang dialami sebagai kelompok yang lemah secara ekonomi dan atribut kekurangan lainnya menjadi kelemahan baginya, namun di sisi lain mereka juga memiliki “senjata-senjata” yang dapat dipertaruhkan dan dimobilisasi dalam medan pertempuran untuk menegosiasikan posisi mereka. Anak jalanan sebagai subjek yang aktif memungkinkan untuk melakukan upaya modifikasi strategi dan alat perjuangan mereka hingga ada keseimbangan kekuasaan secara simbolik.

### **Siasat Sebagai Tindakan Resistensi**

James C. Scott (1993) mendefinisikan resistensi sebagai.

Perlawanan (*resistance*) penduduk desa dari kelas yang lebih rendah adalah tiap (semua) tindakan oleh (para) anggota kelas itu dengan maksud untuk melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak,

penghormatan) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atasan ini. (Scott, 1993: 302)

Pengertian resistensi Scott di atas menandakan bahwa resistensi lahir dari struktur masyarakat yang berlapis, dari kelas bawah terhadap kelas atas. Karena itu, dominasi menjadi kata kunci atas terjadinya perlawanan. Studi ini menggunakan kata opresif untuk menggantikan kata dominasi yang bias kelas. Opresif lebih terbuka untuk menafsirkan penindasan antar kelompok tanpa memasukkan definisi kelas sebagai prasyarat. Sebagaimana kita akan dudukkan relasi kuasa antara anak jalanan dengan negara dan raja-raja jalanan di pihak lain.

Dari definisi resistensi Scott, corak resistensi tidak memiliki keharusan untuk mengambil aksi bersama (Scott, 1993:303). Artinya, resistensi dapat dilakukan oleh individu-individu tertentu dan dilakukan tanpa koordinasi. Sekalipun Gerald Mullin, terutama Eugene Genovese, menyebut tindakan tanpa koordinasi itu sebagai tindakan a-politis dikarenakan keterbatasannya untuk menghasilkan akibat-akibat revolusioner. Akan tetapi Scott membantah bahwa bukankah justru tindakan-tindakan revolusioner juga lebih banyak gagal dari pada berhasil (h. 306).

Seperti dikemukakan oleh Mullin dan Genovese (dalam Scott, 1993: 305), tindakan politis berciri-ciri: (1) Terorganisasi, sistematis, dan kooperatif; (2) Berprinsip dan tanpa pamrih; (3) Mempunyai akibat-akibat revolusioner; (4) Mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi, sedangkan tindakan apolitis umumnya memiliki karakteristik (1) Tidak terorganisasi, tidak tersistematis dan individual; (2) Bersifat untung-untungan dan berpamrih (nafsu akan kemudahan); (3) Tidak mempunyai akibat revolusioner; (4) Dalam maksud dan logikanya mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominasi yang ada.

Scott lebih sependapat dengan pandangan kedua yang menempatkan pembangkangan-pembangkangan individu sebagai bagian dari perlawanan yang menimbulkan keuntungan jangka panjang. Perlawanan ini disebut Scott sebagai perlawanan sehari-hari (*every day forms of*

*resistance*) (Scott, 2000). Perlawanan ini bersifat tanpa organisasi, tanpa memiliki basis kesadaran kelas, tanpa konfrontasi. Scott (1990; 2000:44) membagi ke dalam dua bentuk resistensi, yakni yang sifatnya *hidden transcript* dan *public transcript*. *Hidden transcript* membicarakan resistensi yang sifatnya penyamaran atau simbolik, sementara *public transcript* lebih bersifat frontal dan pembangkangan langsung. Dalam studi ini, lebih banyak menggunakan model *hidden transcript* dalam menjelaskan resistensi anak jalanan Makassar sekalipun demikian *public transcript* tetap digunakan ketika ditemukan adanya model konfrontasi yang dilakukan oleh anak jalanan Makassar.

Konsep perlawanan sehari-hari James C. Scott secara fundamental telah mengubah pandangan kita tentang “politik perlawanan”, di mana kehidupan yang biasa-biasa saja yang nampak seperti keumuman menjadi menarik untuk dibicarakan sebagai bagian dari resistensi kelompok yang lemah dan sarat dengan kontestasi kuasa.

Senjata bagi orang-orang kalah adalah satu istilah yang digunakan oleh James C. Scott untuk menggambarkan pola perlawanan kelas bawah di Sedaka Malaysia. Senjata ini bersifat halus dan menjadi kebiasaan sehari-hari, sehingga dianggap sebagai sebuah keumuman. Konsep Scott dalam penelitian ini digunakan untuk melacak bagaimana anak jalanan melawan negara dan raja-raja jalanan tanpa konfrontasi secara langsung.

Konsep perlawanan sehari-hari yang dikemukakan oleh Scott, setidaknya menekankan pada pertarungan simbolik yang berlangsung secara halus tanpa konfrontasi secara langsung. Di mana satu kelompok yang tertekan menggunakan senjata yang dianggap keumuman dan menampilkan kesan kepatuhan tanpa substansi. Artinya, bahwa kepatuhan yang dipertontonkan pada dasarnya hanyalah alat untuk mengelabui kecurigaan penindas terhadap mereka.

Strategi demikian menurut Scott, jika dilakukan secara terus menerus maka dimungkinkan terjadinya keruntuhan perencanaan yang bersifat hegemonik oleh penindas. Di samping itu, strategi ini tidak mesti dilengkapi sistem koordinasi formal atau perencanaan, melainkan dapat dilakukan semacam bentuk kerja sama pribadi, dilakukan dalam proses tenang dan setengah-tenang (Scott, 2000:40).

Pola tindakan ini biasanya menipu, akibat dari perlawanan sehari-hari yang terus berlangsung. Ini digambarkan dalam bentuk analogi oleh Scott, sebagai tindakan jutaan binatang kecil laut yang menciptakan batu karang yang dapat menggorogoti atau bahkan mengandaskan kapal atau negara (Scott, 2000:49). Perlawanan sehari-hari ini, bisa juga diterapkan dalam kasus persetujuan secara halus antara negara dan rakyatnya. Ini bisa dilihat dari temuan Goran Hyden yang dikutip oleh Scott (2000:43), tentang petani Afrika Timur yang berhasil setelah beberapa puluh tahun menggagalkan atau menghindari kebijakan-kebijakan negara yang mengancam bagi kehidupan para petani. Untuk kasus anak jalanan Makassar adalah salah satu contoh yang dapat dijelaskan dengan menggambarkan bagaimana praktik-praktik menipu bekerja, menunduk tapi menanduk. Sekalipun beberapa kasus dapat dikatakan sebagai strategi lain yang sifatnya frontal dan terbuka, model frontal yang terbuka disebut sebagai *public transcript* yang dikarakteristikkan dengan interaksi terbuka antara kelas-kelas ter subordinasi dengan kelas-kelas yang mendominasi (Scott, 1990).

Kasus anak jalanan yang mereposisi diri mereka dari “penghuni lampu merah” menjadi juru belokan/tikungan (jubeti) justru efektif untuk mempertahankan eksistensi mereka di jalanan. Ini dianggap sebagai hal biasa, tindakan yang disamakan dengan juru parkir yang membantu dari segi keamanan dan kemudahan. Di sisi lain, tidak lagi menjadi lahan garapan bagi Satpol PP karena kesan yang dimunculkan oleh anak jalanan adalah menjual jasa. Bukankah substansinya sama ketika mereka “*ngamen*” yang juga menjual jasa? Di atas pentas boleh dikatakan bahwa anak jalanan telah mampu menundukkan hegemoni negara secara simbolik.

Menurut Scott, perlawanan bukanlah untuk menjatuhkan atau mengubah sebuah sistem dominasi, melainkan untuk bertahan hidup. Perlawanan sehari-hari inilah yang disebut Scott sebagai transkrip di balik layar (*hidden transcript*). Dengan merujuk pada pengertian itu, tidak ada keharusan bahwa perlawanan selalu dalam bentuk aksi bersama, frontal, atau konflikual, atau dalam bentuk aksi yang berwatak ideologis. Perlawanan demikian jika kita lihat secara detail dan saksama dilakukan dalam praktik-praktik harian yang halus, meluruhkan, dan melarutkan sesuatu yang pada awalnya digunakan sebagai alat dominasi. Salah satu teknik melawan adalah melalui taktik penguasaan ruang tertentu, melalui ruang-ruang yang dikuasai mereka melakukan perlawanan

simbolis berupa aksi-aksi bicara dengan menolak definisi yang diberikan oleh pihak lain dan memaknai pengalaman mereka sendiri. Selain aksi bicara, perlawanan simbolis juga muncul dalam cara berpakaian mereka.

Pertarungan simbolis bukan hanya penafsiran belaka, melainkan berada dalam konteks untuk mempertahankan diri agar dapat makan. Dengan demikian, menguasai atau mempertahankan ruang, aksi-aksi bicara, dan penampilan berpakaian adalah taktik-taktik yang digunakan untuk mempertahankan diri agar dapat tetap bertahan hidup (Ghofur, 2009).

Kehadiran anak jalanan di beberapa belokan/ tikungan, sebagai tanda pergeseran dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Perencanaan tata kota yang membidik anak jalanan agar meninggalkan ruang (jalanan) sama sekali tidak memiliki efek yang keras dan mengalami kejatuhan yang serius bagi anak jalanan. Mereka tetap *survive* dengan mengandalkan kemampuan mereka sendiri yang penuh keterbatasan itu.

### **Praktik Opresif: dari Negara sampai Raja-Raja Jalanan**

Sebelum menjelaskan lebih jauh bagaimana tindakan opresif negara, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu dari mana datangnya kewenangan negara untuk melakukan opresif terhadap anak jalanan dan bagaimana anak jalanan diberikan hak dan kewajiban sebagai perwujudan dari pembatasan kebebasan anak jalanan. Olehnya itu, Perda sebagai norma dijadikan titik awal untuk memahami tindakan negara karena menurut hemat penulis dari sinilah datangnya distribusi kekuasaan yang memberikan kewenangan pada negara (aparatus) dan sekaligus membatasi kebebasan anak jalanan.

Perda 2/2008 lahir akibat dari keprihatinan pemerintah kota dalam melihat kondisi sosial anak jalanan yang memprihatinkan, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan sosial budaya (Wawancara dengan Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial, 15 Agustus 2014). Di sisi lain yang menjadi dasar pertimbangan adalah “(a) bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kemanfaatan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar mereka dapat menjadi warga Kota Makassar yang lebih bermartabat; (b) bahwa mengingat keberadaan

anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan” (Perda 2/2008, Menimbang, poin a dan b).

Dasar pertimbangan di atas sangat ideal dibanding kenyataan bahwa yang menjadi kepentingan negara sesungguhnya adalah bagaimana kota tampil dengan wajah yang sesuai dengan ideologi ketertiban, ketentraman umum, keindahan kota. Ini bisa dikaitkan dengan visi kota *Makassar Menuju Kota Dunia* yang juga bertepatan dengan hadirnya Perda 2/2008. Bahwa pencapaian kota dunia, maka dengan sendirinya harus menyesuaikan dengan standar-standar kota modern yang tertata dengan baik ditambah persoalan-persoalan sosial yang teratasi. Kaitannya dengan ideologi ketertiban, maka jelas pada pasal 3 poin a tentang tujuan pembinaan, di mana dijelaskan bahwa tujuannya adalah “menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat”.

Selain itu, juga diperkuat dari keterangan Kasatpol PP dan Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Makassar, bahwa keberadaan anak jalanan ini mengganggu dan membahayakan pengguna jalan yang dapat ditafsirkan sebagai persoalan “ketentraman masyarakat” tadi (Wawancara, 14 dan 15 Agustus 2014). Karenanya untuk mencapai tujuan negara, maka diperlukan cara-cara taktis yang dapat memudahkan.

Kalaupun Perda 2/2008 telah mengatur hak-hak bagi warga (anak jalanan) untuk diperlakukan dengan baik, diberikan jaminan akan terpenuhinya hak mereka. Di sisi lain, mereka juga harus patuh dan tunduk pada kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara. Misalnya, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya (Pasal 44 poin 1 dan 2). Di sisi lain, negara juga memiliki hak (wewenang) untuk menentukan boleh tidaknya anak melakukan aktivitas di jalanan.

Karena negara dipandang sebagai aktor rasional, maka negara memiliki tujuan terkait dengan batasan-batasan yang diberikan kepada

warganya sendiri. Ini dapat diketahui manakala dilakukan penyelidikan terkait dengan keputusan-keputusan yang dibuatnya, sebagaimana dijelaskan di atas terkait tujuan negara. Jika negara dipandang sebagai aktor rasional, tentunya segala kebijakannya memberikan asas manfaat yang lebih. Bagaimana jika kebijakan yang dimaksud memberikan dampak sosial yang buruk bagi warganya?

Dari segi identitas sosial anak, Perda 2/2008 dengan jelas mengatakan “bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kemanfaatan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar mereka dapat menjadi warga Kota Makassar yang lebih bermartabat”. Dalam frasa ini boleh dikatakan bahwa anak jalanan sejak awal telah dilabeli sebagai warga kota yang “kurang bermartabat”. Pada penjelasan lain, anak jalanan diidentikkan dengan pengganggu ketertiban atau membahayakan ketenteraman umum. Konsekuensi dari regulasi ini adalah terciptanya identitas sosial bagi orang-orang jalanan, termasuk anak jalanan.

Pengelompokan antara anak jalanan yang kurang bermartabat dengan warga kota lain yang lebih bermartabat, dilegalkan dalam produk hukum yang menggunakan alasan moral, kultur dan aspek lainnya sebagai dasar untuk menjustifikasi. Hal ini bersifat rasional bagi warga kota kebanyakan yang telah dicangkoki pemikiran sejak awal yang memiliki sejarahnya sendiri, sehingga sulit untuk keluar dari pemahaman kaku tersebut. Karena ini diterima sebagai pendapat umum (*common sense*) yang kemudian dibenarkan secara legal formal, maka negara mendapatkan kekuatan untuk melakukan tindakan koersif dalam usaha melenyapkan anak jalanan.

Dikarenakan Perda telah mengelompokkan anak jalanan sebagai warga yang “kurang bermartabat”, sehingga pembinaan anak jalanan diperlukan “*agar mereka dapat menjadi warga Kota Makassar yang lebih bermartabat*” (Perda, 2/2008). Termasuk di dalamnya pernyataan Kasatpol PP yang menggambarkan anak jalanan sebagai *pengganggu* sekalipun pertimbangan moral juga disisipkan dengan adanya keprihatinan bagi keselamatan anak jalanan (Wawancara dengan Kaspol PP Kota Makassar, 14 Agustus 2014). Justifikasi ini mendorong terjadinya tindakan-tindakan koersif sampai kepada

institusionalisasi oleh negara, yang dapat dibenarkan secara legal.

Baik Perda maupun pernyataan Kasatpol PP, justifikasi demikian melahirkan identitas sosial bagi anak jalanan yang dengannya menciptakan demarkasi di ranah sosial, antara yang bermartabat (normal) dan tidak bermartabat (abnormal). Akibat dari adanya demarkasi, label abnormal menjadi keniscayaan dan menyebar ke dalam sendi-sendi kehidupan warga kota lainnya. Justifikasi ini tidak lain merupakan serangkaian dominasi, yang bekerja dengan cara praktik pembelahan.

Penangkapan yang dilakukan atas Aco<sup>5</sup> dikarenakan aktivitasnya sebagai pengamen yang menurut ketantuan Perda dianggap sebagai pelanggaran dan tidak bermartabat dapat dikemukakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP yang berakar dari praktik labeling di dalam Perda 2/2008. Aco dan anak jalanan lainnya merupakan korban dari pengkotak-kotakan yang bekerja secara terselubung. Berangkat dari argumentasi yang didominasi atas penilaian subjektif yang kemudian diformalkan dalam bentuk regulasi.

Perda 2/2008 memberikan kewenangan kepada Satpol PP dan Dinas Sosial dalam hal penanganan anak jalanan, di samping membatasi kebebasan anak jalanan melakukan aktivitas. Karena kewenangan itulah, maka Satpol PP dan Dinas Sosial melakukan razia untuk membatasi keberadaan anak jalanan. Hanya saja dalam setiap kali razia, seringkali bertindak represif yang mengakibatkan anak jalanan menjadi korban.

---

<sup>5</sup> Aco (16), dulunya berprofesi sebagai pengamen, juru parkir liar dan juga pernah berprofesi sebagai penjaja koran. Dia meninggalkan profesinya sebagai pengamen dan juru parkir karena sering ditangkap saat razia dilakukan oleh Satpol PP. Sementara itu, dia meninggalkan profesinya sebagai penjaja koran setelah ditipu oleh bosnya yang suka judi, sehingga gajinya tidak pernah dia terima. Aco merupakan anak keempat dari lima bersaudara. Orang tuanya sudah meninggal dunia dan kini dia tinggal dengan neneknya. Aco yang pernah mengenyam pendidikan sampai kelas 3 Sekolah Dasar (SD) ini merupakan keluarga miskin. Hasil yang dia dapatkan di jalanan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama neneknya dan adiknya. Sementara itu, kakaknya bekerja sebagai buruh harian dengan pendapatan yang tidak menentu. Sekarang, Aco merasa nyaman dengan profesi barunya sebagai Jubeti.

Razia ini rutin dilakukan sebagaimana diutarakan oleh Kasatpol PP kepada penulis saat melakukan wawancara pada tanggal 14 Agustus 2014 di Makassar. Setiap dilakukan razia ada beberapa orang jalanan yang biasanya kedapatan, baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan aktivitas di jalan sebagai pengemis, pengamen dan sebagainya, mereka inilah yang kemudian ditangkap lalu diberikan pembinaan.

Proses penangkapan yang dilakukan Satpol PP tidak semua dilakukan dengan jalan lunak akan tetapi biasanya dilakukan dengan sedikit keras. Termasuk anak jalanan yang kedapatan melakukan aktivitas sebagaimana yang dilarang dalam Perda, diperlakukan secara kasar baik sifatnya fisik maupun secara verbal, Ini diakui oleh anak jalanan yang penulis temui di lapangan. Sementara itu, alat-alat yang digunakan anak jalanan seperti gitar bagi pengamen, alat mereka dapat dihancurkan dan biasanya memang dihancurkan oleh Satpol PP karena tindakan ini dijamin dan dibenarkan secara legal dalam Perda 2/2008 Pasal 52 ayat 3, di mana “sanksi kepada pengamen yang mengamen di jalanan dilakukan penyitaan peralatan musik dan dapat dilakukan pemusnahan”.

Tindakan represif dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP, sepertinya jalan pintas untuk memberikan efek jera pada anak jalanan, dikarenakan anak jalanan yang telah dirazia atau telah direhabilitasi di Panti Sosial tetap turun ke jalan. Sehingga bisa dijadikan alasan kenapa tindakan kekerasan dilakukan. Tindakan represif bukan berarti dapat dibenarkan dalam konteks pembinaan bagi anak jalanan. Justru tindakan represif menghilangkan semangat dari pembinaan yang digalakkan oleh pemerintah kota.

Perlakuan terhadap anak jalanan tidak berhenti pada sekedar stigmatisasi negatif (*labeling*) atau diperlakukan secara kasar, tetapi juga pada penangkapan anak jalanan yang diserahkan kepada Dinas Sosial untuk menjalani “rehabilitasi sosial”. Sistem rehabilitasi tidak lain merupakan sistem institusi total yang diperkenalkan oleh Goffman. Dalam rehabilitasi tersebut, individu akan “dikerangkeng” dan dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang “bermartabat”. Sistem ini akan mendisiplinkan para penyimpang yang telah mendapatkan label dari pemegang otoritas (Pemerintah Kota Makassar). Anak jalanan yang dimasukkan ke dalam panti, akan “dibina” dan diberikan

pelatihan-pelatihan agar kelak setelah keluar panti, mereka tidak lagi turun ke jalanan. Atau anak-anak yang putus sekolah akan dimasukkan kembali ke sekolah sementara orang tua anak akan diberikan modal usaha agar dapat menjalankan kehidupan normal (Wawancara dengan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, 14 Agustus 2014).

Model institusionalisasi ini terkadang tidak berhasil, banyak anak jalanan tetap turun ke jalan. Dan bahkan orang tua anak yang telah diberi modal, justru modal yang diberikan lebih banyak masuk “kantong” daripada digunakan untuk membuka usaha baru. Sementara pemerintah kota berharap bahwa modal yang diberikan agar dipergunakan sebaik-baiknya dengan cara membuka usaha baru yang memungkinkan anggota keluarganya dapat dihidupi.

Dari uraian di atas, mulai proses *labeling* sampai pada institusionalisasi pada dasarnya berbicara tentang kekuasaan sebagai perwujudan dari statisme negara. Orang-orang atau institusi yang memiliki otoritas akan menggunakan instrumen apa saja dalam melemahkan orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Dalam kasus anak jalanan, instrument hukum menjadi dominan digunakan sebagai alat pukul bagi anak-anak yang tidak memiliki kekuasaan. Anak-anak yang telah dikategorisasi atau di label sebagai orang bodoh, kotor dan sebagainya oleh orang-orang atau institusi yang berkuasa, maka menjadi sah untuk diperlakukan berdasarkan kehendak dari pemegang otoritas. Akan tetapi, anak jalanan sebagai aktor rasional memiliki kapasitas untuk menerima atau menolak klaim sang pemegang otoritas.

Anak jalanan tidak hanya berhadapan dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat, mereka juga harus menghadapi tekanan lain yang berasal dari sesamanya sebagai orang jalanan, seperti Pak Ogah. Pak Ogah, yang rata-rata telah berusia dewasa dengan tampilan fisik yang jauh lebih besar dari kebanyakan anak jalanan, memiliki pengaruh dan kekuatan yang jika dikerahkan secara maksimal akan menyudutkan anak jalanan.

Kehadiran Pak Ogah bukan sekedar bagaimana mereka punya andil dalam proses lancarnya lalu lintas di Makassar, akan tetapi kehadirannya juga menjadi ancaman bagi kelangsungan aktivitas anak jalanan. Anak jalanan yang biasanya menghabiskan aktivitasnya di jalan, sebagaimana yang dilakukan Pak Ogah,

yakni mengatur lalu lintas, terkadang harus meninggalkan lahan garapan mereka manakala Pak Ogah berhasrat menguasai lahan yang telah dikuasai oleh anak jalanan.

Selain aparat dan Pak Ogah, tekanan juga datang dari preman jalanan. Anak jalanan tidak jarang mendapatkan pukulan dari preman, jika si anak menolak memberikan uang. Dengan postur tubuh yang memadai, si preman dengan mudah menaklukkan anak jika terjadi kontak fisik. Pengakuan beberapa anak, mereka lebih bersedia memberikan sebagian dari uang yang mereka dapatkan, ketimbang mendapatkan *ba'ji* [pukulan] atau konfrontasi secara langsung. Ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang lebih memberatkan bagi mereka. Bahkan jika si anak menampilkan kesan melawan, maka tidak jarang mereka akan diintimidasi secara terus-menerus. Preman justru akan lebih sering datang berkunjung, karena dianggap si anak akan semakin membangkang jika tidak mendapatkan pengawasan atau kunjungan yang rutin. Apabila si anak memberikan kesan patuh dan cepat memberikan uang, si preman tidak akan melakukan kekerasan.

Dari kekerasan yang mengancam, anak jalanan memiliki cara untuk mensiasati preman. Uang yang mereka dapatkan akan disembunyikan di tempat-tempat tertentu agar tidak terlihat oleh preman. Karena menurut mereka biasanya si preman tidak segan untuk mengeledah si anak. Dengan cara menyembunyikan sebagian hasil, anak jalanan dengan sendirinya menyelamatkan hasil yang mereka dapatkan dengan susah payah.

Preman yang sering mengganggu anak jalanan, bukanlah preman tulen. Akan tetapi preman gadungan yang masih remaja. Bahkan ada sebagian yang justru dikenal oleh anak jalanan dikarenakan mereka tinggal dalam satu kompleks. Biasanya mereka memalak anak jalanan karena ingin membeli minuman atau obat-obatan. Ini diketahui dari pengakuan anak jalanan (Wawancara dengan Aco, 20 April 2014).

Jika preman biasanya memalak, lain halnya dengan sang pelindung. Sang pelindung ini menjadi patron bagi si anak. Apabila terjadi sesuatu pada si anak, misalnya tertangkap razia. Maka sang pelindung ini akan bergerak cepat dan menghubungi koneksinya di jajaran aparat untuk membebaskan anak-anaknya. Dari perlindungan ini, maka si anak harus memenuhi kewajibannya kepada si patron dengan cara memberikan setoran. Jumlah setoran sebesar Rp.5.000,- setiap

hari, apabila si anak turun ke jalan. Dan apabila si anak tidak menyetor, maka akan mendapatkan ganjaran, baik sifatnya fisik maupun kekerasan verbal.

Saat penulis melakukan wawancara pada tanggal 29 Maret 2014, kebetulan pada saat itu sang patron ada dilokasi, namanya bunda Mita (bukan nama sebenarnya). Bunda Mita inilah yang banyak memberikan bantuan kepada anak jalanan yang berada di bawah kendalinya. Mengenai setoran, ini disampaikan sendiri oleh bunda Mita kepada penulis. Bunda Mita juga memberikan aturan tambahan bagi anak-anaknya yang masih sekolah. Bagi yang masih sekolah, anak akan dibatasi jam terbangnya. Bunda Mita bahkan memaksa anak-anak yang masih sekolah untuk pulang ke rumah pada jam 7 malam, seperti yang terjadi pada Cidu<sup>6</sup>.

Mengenai sanksi, saat perbincangan saya sementara berlangsung dengan bunda Mita dan beberapa anak-anaknya di tepi jalan. Tiba-tiba muncul seorang anak, yang ternyata belum menyetor kepada bunda Mita dari hari kemarin. Anak tersebut tidak hanya mendapat umpatan dari bunda Mita, akan tetapi anak-anak yang lain juga ikut mengejek. Bahkan salah seorang di antara mereka langsung memberikan pukulan pada perut si anak. Akhirnya, si anak tadi tidak ikut bergabung dan langsung kabur. Pemandangan yang saya saksikan itu, menjadi hal biasa-biasa saja bagi bunda Mita dan anak-anaknya. Bunda Mita menuturkan, bahwa bukan sekedar persoalan setorannya yang membuat dia marah. Akan tetapi si anak tadi ketahuan berbohong. Pengakuannya kepada bunda Mita, bahwa dia tidak turun kejalan. tetapi anak-anak yang lain memberikan laporan kepada bunda Mita bahwa anak yang tadi turun kejalan dan mendapatkan uang yang lumayan banyak. Hal inilah yang membuat bunda Mita semakin marah.

Salah satu aturan dalam kelompok ini, apabila tidak turun ke jalan dalam sehari maka kewajibannya akan gugur dengan sendirinya. Mereka tidak akan dikenai setoran yang jumlahnya sebesar Rp.5.000,-. Namun sebaliknya, apabila turun ke jalan, maka mereka harus menyetor kepada bunda Mita.

---

<sup>6</sup>Cidu (12) masih sekolah di salah satu SD dekat rumahnya. Cidu ini berasal dari keluarga miskin, ayahnya berprofesi sebagai tukang becak. Dia juga berprofesi sebagai Jubeti. Aktivitas ini dilakukan setelah pulang sekolah dan pulang ke rumah setelah jam 7 malam.

Model perlindungan semacam ini sangat bermanfaat bagi anak. Hanya saja, yang masih menjadi tanda tanya bagi penulis adalah peran bunda Mita ini ketika berhadapan dengan Pak Ogah sebagaimana diutarakan sebelumnya. Menghilangnya Cidu dan Boy<sup>7</sup> serta kawan-kawannya di Hertasning, dengan sendirinya memunculkan pertanyaan seberapa besar pengaruh bunda Mita bagi perlindungan anak-anaknya. Jika terkait hal penangkapan yang dilakukan oleh aparat, maka peran itu terlihat. Namun saat Cidu dan kawan-kawannya menghilang di Hertasning akibat ekspansi Pak Ogah, peran perlindungan sepertinya tidak bekerja.

Kehadiran pelindung seperti bunda Mita, setidaknya pengalaman yang terjadi pada Aco, tidak dirasakan oleh Cidu. Aco yang biasa berhadapan dengan preman gadungan akan lebih mudah menjadi korban ketimbang Cidu yang memiliki pelindung. Sekalipun Aco bagi kelompoknya, seperti Adit<sup>8</sup> memiliki posisi yang sama dengan bunda Mita sebagai pelindung, akan tetapi posturnya yang tidak memadai menyebabkan kekalahan dan potensi dirinya dan kelompoknya menjadi korban sangat terbuka. Aco hanya bisa diandalkan manakala yang dihadapi adalah anak-anak yang seusianya.

Dari serangkaian tindakan opresif di atas, apa yang dapat ditarik sebagai kesimpulan sementara adalah pada akhirnya tindakan opresif menjadi ancaman terhadap subsistensi anak jalanan. Dengan cara penyingkiran dari jalanan yang dilakukan oleh aparat (negara) sama saja memisahkan anak jalanan dari ruang di mana mereka dapat memperoleh pundi-pundi rupiah.

---

<sup>7</sup>Boy (15) merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Dia ini satu komplotan dengan Cidu. Hanya saja, Boy sudah putus sekolah. Kehidupan ekonominya tidak jauh berbeda dengan anak jalanan lainnya. Bapaknya berprofesi sebagai tukang becak. Boy sebagaimana halnya Cidu, dia juga mendapatkan perlindungan dari Bunda Mita.

<sup>8</sup>Adit (8) ini merupakan anak buah dari Aco. Dia mengikuti profesi bosnya sebagai Jubeti. Dia belum mengenyam pendidikan formal sama sekali. Dia masih memiliki keluarga lengkap, ayah dan ibu. Adit ini tetangga dekat sang bos Aco. Adit juga berasal dari keluarga tidak mampu, ayahnya berprofesi sebagai kuli bangunan. Dia ini belum pernah ditangkap, dia termasuk orang baru di jalanan. Adit ini anak bungsu dari empat bersaudara. Saudaranya yang perempuan menjadi pedagang asongan di Pantai Losari, sementara kakak laki-lakinya yang dua orang mengikuti jejak ayahnya sebagai kuli bangunan.

Padahal pundi-pundi rupiah yang didapatkan bersifat subsisten dikarenakan dengan uang yang didapatkan hanya mencukupi kebutuhan hari itu saja. Sementara apa yang dilakukan oleh raja-raja jalanan merupakan bentuk eksploitasi. Maka dari semua bentuk opresif yang eksploitatif dan mengancam keamanan subsistensi anak jalanan akan dilawan.

### Siasat Melawan Praktik Opresif

Dalam epik yang heroik, perlawanan hadir karena adanya ketidakseimbangan dalam relasi sosial. Kelompok yang merasa ada yang hilang dalam diri mereka, akan menentukan sasaran kelompok mana yang telah merenggutnya. Dalam hal ekonomi, baik kelompok maupun individu yang dirugikan, akan mempertimbangkan langkah-langkah kongkrit guna menutupi kekurangan dengan cara melawan, baik menjatuhkan lawan atau setidaknya menciptakan situasi setara. Menurut Barker dalam kaitannya dengan kajian budaya, perlawanan muncul dari hubungan kekuasaan dan subordinasi di mana kebudayaan yang mendominasi berusaha memaksakan dirinya kepada kebudayaan subordinat dengan semena-mena (Barker, 2009: 363).

Lain halnya dengan Bloch (dalam Scott, 2000) yang telah menggali artefak sejarah perlawanan. Bahwa sering kali perlawanan kolektif berakhir dengan kesia-siaan. Jika pemberontakan gagal, maka sudah dipastikan bahwa pembantaian akan berjalan terus guna membumi hanguskan kerikil-kerikil pengganggu. Siapa lagi kalau bukan si pemborontak, karena mereka dianggap mengganggu stabilitas dan ketentraman umum dan tentunya bertentangan dengan kelompok penguasa. Sebagaimana diutarakan oleh Bloch di atas, bahwa aksi kolektif yang melawan barikade dominasi yang banyak mengalami kekalahan pada akhirnya berujung pembantaian massal. Jika aksi kolektif potensinya selalu gagal, maka apakah ada aksi alternatif yang lebih menjanjikan untuk menembus dominasi? Bloch menawarkan aksi diam-diam yang kemudian digambarkan oleh Scott (2000) dalam pertarungan kelas di Sadakah Malaysia

Studi ini tidak bermaksud untuk menjelaskan pertentangan kelas, akan tetapi menjelaskan perlawanan purposif dengan jalan lunak. Dengan menempatkan individu-individu sebagai aktor rasional yang memiliki kalkulasi dan tujuan yang ingin dicapai. Corak perlawanan ini lebih disebut sebagai pertunjukan aksi-aksi atau siasat, yang

tidak membutuhkan koordinasi dan tidak pula bersifat kolektif. Akan tetapi tindakan-tindakan perseorangan dengan memanfaatkan sumber daya sedapatnya yang mereka miliki. Di mana tindakan berdampak luas pada tatanan yang lebih besar. Ini semacam penggambaran Scott (1990) tentang *hidden transcript*, di mana perlawanannya didasarkan pada tindakan yang dilakukan secara individu, tidak terorganisir dan bisanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tujuan perlawanan ini tidak selamanya bersifat agung seperti mengendalikan kekuasaan, tetapi mempertahankan lahan ekonomi atau menyelamatkan kehidupan mereka dari kerawanan subsistensi.

Studi tentang anak jalanan yang berjuang mempertahankan sumber daya ekonomi (penghasilan) di jalanan, walaupun tidak dapat diklaim sebagai keberhasilan; setidaknya mereka mampu menunjukkan atau memberikan efek bagi perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah kota menjadi kacau dan tidak bekerja secara maksimal. Secara statistik<sup>9</sup>, bertambahnya jumlah anak jalanan di Makassar tidak dapat disederhanakan begitu saja. Jika pemerintah setiap harinya melakukan razia dan penangkapan terhadap anak jalanan, maka mengapa anak-anak disetiap tahunnya justru bertambah? Dengan demikian, seberapa berhasil aksi pemerintah dalam melenyapkan anak-anak jalanan di Kota Makassar?

Siasat anak jalanan dalam melawan sikap opresif aparat, tidak bertujuan untuk membesar-besarkan yang kelihatan sepele itu. Tapi alangkah baiknya kita mempertimbangkan aksi-aksinya sebagai sesuatu yang layak untuk ditulis karena aksi-aksinya hadir bukan secara tiba-tiba atau tanpa pertimbangan secara rasional. Melainkan aksi yang dilakukan anak-anak jalanan mempertimbangkan untung rugi dan konsekuensi apa yang akan dihadapi kelak.

Tim Harford (2011) dalam bukunya *Logika Hidup* cukup baik menjelaskan pilihan-pilihan seseorang dengan konsekuensi-konsekuensi yang menyertainya. Artinya, manusia memiliki kapasitas rasional untuk menentukan pilihan di antara bermacam pilihan dengan segala risikonya. Bagi Harford, manusia lebih memilih sesuatu

---

<sup>9</sup>Jumlah anak jalanan di Kota Makassar dari tahun ke tahun: tahun 2008: 869 orang; 2009: 870 orang; 2010: 901 orang; 2011: 918 orang; 2012: 990 orang; 2013: 1043 orang. Data ini menunjukkan pertambahan jumlah anak jalanan di Kota Makassar dalam rentang waktu dari tahun 2008-2013. Data ini bersumber dari Dinas Sosial Kota Makassar.

apabila sesuatu itu memiliki risiko yang minim daripada yang lainnya dengan risiko lebih besar.

Berikut ini akan dijelaskan bagaimana aksi-aksi anak jalanan ketika menghadapi tindakan opresif. Setidaknya terdapat tujuh siasat anak jalanan dalam melawan praktik opresif. *Pertama, Penggunaan Senjata Busur*. Dalam kasus anak jalanan, kenapa busur menjadi salah satu alat perlawanan, logikanya sederhana dan itu didasarkan pada risiko. Dari jarak jauh, busur ini mampu menjangkau lawan. Artinya, sebelum lawan mendekat, maka senjata yang paling mungkin bisa dikerahkan untuk membatasi ruang gerak lawan hanyalah busur. Sama halnya dengan anak jalanan yang berkeinginan untuk membatasi ruang gerak aparat Satpol PP ketika razia berlangsung. Penggunaan busur ini sangat menyulitkan aparat Satpol PP ketika melakukan penangkapan terhadap anak jalanan karena risikonya sangat besar.

Memilih menggunakan senjata merupakan salah satu tindakan yang masuk akal jika dibandingkan berhadapan *face to face* dengan aparat. Manusia memang memiliki kelebihan dalam menghadapi lingkungan sekitarnya. Jika hewan sekedar mendasarkan tindakannya karena naluri semata, manusia akan berinovasi saat menghadapi perubahan atas lingkungannya. Manusia akan mencari cara-cara baru dalam menghadapinya dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensinya. Sebagaimana asumsi di kalangan teoritis *rational choice*, bahwa manusia akan menentukan pilihan berdasarkan besar kecilnya risiko yang akan dihadapi. Penggunaan busur ini adalah salah satu bentuk *public transcript* menurut Scott.

*Kedua, Penghindaran*. Penghindaran biasanya dilakukan dalam kondisi tertentu, di mana kelompok yang lemah akan menjauhi kelompok yang lebih kuat. Penghindaran ini boleh dikatakan merupakan sebaik-baiknya perlawanan, jika tidak ingin disebut sebagai tindakan pengecut, strategi ini tidak berisiko dan nirkekerasan.

Penghindaran yang kelihatannya sepele, tidak jantan dan lemah, justru memiliki akibat yang lebih besar. Penghindaran ini mampu mempengaruhi berhasil tidaknya kebijakan negara atau runtuh tidaknya harapan-harapan yang ingin diraih oleh kelas dominan. Tindakan penghindaran ini merupakan langkah taktis yang rasional, penuh pertimbangan dari risiko yang mungkin saja dapat menyimpannya. Maka jangan heran, betapapun

orang dianggap sebagai pengecut, tujuan tetap menjadi prioritas ketimbang mempertontonkan kontestasi yang nyata-nyata dapat mempermalukan dirinya akibat dari sebuah kekalahan. Karena itu, penghindaran bukan sekedar taktik biasa, melainkan ada cita-cita atau tujuan utama yang mesti diraih dan dipertahankan demi sebuah keberlangsungan hidup diri dan keluarga.

*Ketiga, Cemooh (Senjata Verbal).* Kita sebagai penonton yang berada dipinggiran, tentunya penggunaan kata-kata kotor yang berbalas antara anak jalanan dengan aparat merupakan pertunjukan alat-alat simbolik untuk saling menjatuhkan. Jika aparat menggunakan kata-kata kotor untuk menekan psikis anak dan menjatuhkan dipementasan lain, seperti saat aparat menjelaskan kejelekan anak-anak ini kepada penulis; akan tetapi di panggung lain, anak-anak ini juga melakukan hal yang sama, di mana menjelek-jelekan aparat sebagai manusia yang kejam dan beringas. Menjelek-jelekan tidak dapat dikesampingkan sebagai peristiwa biasa, karena di sana ada hasrat untuk menjatuhkan lawan. Karenanya, ini termasuk peristiwa politik dalam skala mikro yang mana masing-masing pihak menggunakan senjata verbal untuk melawan atau membalas tindakan lawan.

*Keempat, Transformasi Diri menjadi Jubeti.* Alasan anak jalanan menjadi Jubeti karena sebuah pilihan setelah beberapa kali ditangkap saat berprofesi sebagai pengamen atau penjaja Koran, seperti halnya kasus Aco. Pilihan ini tidak bisa dipandang sebagai pilihan yang tidak berdasar. Pilihan ini bersifat purposif, di mana ada tuju-tujuan yang ingin dicapai. Olehnya itu, preferensi anak untuk bertransformasi menjadi Jubeti memiliki dasar logika ekonomi (pilihan rasional), yang mempertimbangkan keuntungan masa depan beserta biaya-biaya yang dibutuhkan. Bahwa menjadi Jubeti, secara ekonomi lebih menjanjikan dan peluang-peluang terjadinya penangkapan oleh Satpol PP semakin kecil, karena Jubeti “dianggap” membantu bagi lancarnya lalu lintas di kota Makassar yang telah mulai mengalami kepadatan kendaraan.

*Kelima, Kolusi dengan Aparat.* Kolusi semacam ini akan berdampak pada segenap perencanaan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh negara. Anak jalanan yang telah distigmakan sebagai kelompok abnormal atau warga kurang bermartabat ini, akan sulit direhabilitasi jika aparat sendiri sering melepaskan mereka. Bukan

hanya itu, perencanaan operasi-operasi yang telah tersusun secara matang oleh institusi, akan berantakan akibat adanya informasi yang dibocorkan oleh aparat tertentu kepada objek sasaran. Maka jelas, praktik kolusi ini merugikan bagi negara yang juga memiliki tujuan pendisiplinan pada warganya.

*Keenam, Meninggalkan Lahan Garapan.* Meninggalkan wilayah kekuasaan (garapan) tidak selamanya dapat ditafsirkan sebagai langkah keliru atau sebagai bentuk kekalahan yang memalukan. Akan tetapi “meninggalkan atau berpaling” bisa juga ditafsirkan sebagai langkah taktis untuk menghindari risiko yang lebih besar. Kasus anak jalanan yang meninggalkan lahan garapan setidaknya dua alasan; takut dipukuli dan rasa tidak nyaman untuk bergabung karena merasa asing. Cara ini ditempuh ketika berhadapan dengan raja-raja jalanan.

*Ketujuh, Menyembunyikan Uang.* Menyembunyikan sebagian uang bagi anak jalanan tidak bisa dilepaskan dari pengalaman sebelumnya yang sering dipalak oleh preman jalanan. Metode ini dianggap efektif untuk mengurangi kerugian yang lebih besar. Dengan menyembunyikan inilah, hasil kerjanya dapat dirasakan oleh diri dan keluarga anak jalanan yang dipergunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Dari panorama perlawanan anak jalanan, kita tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan jika sekedar melihatnya atau mereduksi aksi-aksi mereka sebagai sesuatu hal yang biasa tanpa menelusuri motivasi apa yang menjadi latarnya. Karena itu, sebagaimana diasumsikan oleh para teoritis dalam teori tindakan, bahwa tindakan merupakan produk dari suatu keputusan untuk bertindak dengan tujuan tertentu (Jones, 2010: 25). Artinya, bahwa setiap tindakan manusia diasumsikan sebagai tindakan purposif yang memiliki motivasinya sendiri. Hal ini sejalan dengan teori pilihan rasional yang memandang manusia sebagai makhluk rasional yang memiliki pertimbangan untung-rugi atau risiko-risiko yang akan dihadapi ketika memutuskan pada pilihan tindakan tertentu.

Lalu apa motivasi anak jalanan sesungguhnya? Jawabannya sederhana, bahwa uang adalah segala-galanya. Anak jalanan yang telah direhabilitasi, jika menemukan kondisinya berubah atau lebih banyak menghasilkan uang daripada aktivitasnya di jalanan selama ini, maka mereka akan meninggalkan pola kehidupan lamanya sebagai anak jalanan. Sebaliknya jika

ternyata kondisinya tidak lebih baik dari penghasilan mereka di jalanan, maka dapat dipastikan bahwa mereka akan tetap kembali ke jalanan. Oleh karena itu, kembalinya anak jalanan ke tempat semula sebagaimana biasanya dapat dijelaskan sebagai tindakan purposif atau tindakan yang rasional.

Selain faktor ekonomi, tidak kalah pentingnya adalah persoalan keselamatan. Sekalipun faktor keselamatan ini lebih bersifat sekunder ketimbang faktor ekonomi yang lebih bersifat primer. Bagaimanapun untuk memaksimalkan keuntungan atau mencapai tujuan, prasyaratnya juga harus selamat. Tidak mungkin anak jalanan dapat mencapai tujuan mereka jika pada proses mengejar tujuan itu mereka celaka. Karenanya, untuk mencapai tujuan maka harus selamat terlebih dahulu.

Untuk selamat, seseorang akan menempuh atau memilih tindakan berdasarkan risiko minimum. Semakin besar risiko yang dihadapi pada pilihan tindakan tertentu, maka semakin besar potensinya untuk menghindari atau mencari pilihan lain yang risikonya lebih rendah. Karena itu, membayar upeti kepada patron atau kepada preman lebih baik ketimbang mengambil risiko dengan jalan melawan secara frontal. Tindakan demikian, lebih menyelamatkan dan lebih menjamin keberlangsungan aktifitas ekonomi di masa mendatang. Begitu juga halnya, membicarakan aparat atau menjelek-jelekkkan di belakang layar, jauh lebih baik daripada *face to face* di depan layar. Semua tindakan yang dipilih tidak lain demi keselamatan dan jaminan-jaminan yang lebih aman bagi keberlangsungannya di jalanan.

James C. Scott (2000) menyebutkan bahwa motivasi perlawanan kelompok yang lemah bukan untuk merubah struktur sosial yang telah ada atau menghilangkan struktur dominasi, melainkan mengembalikan keadaan sebagaimana biasanya. Karena itu, tindakan perlawanan bukan untuk memaksimalkan keuntungan melainkan sekedar bagaimana mereka tidak mengalami ancaman subsistensi. Seperti disebutkan Popkin (1986: 6), petani enggan mengambil ririsikosiko dan lebih memusatkan diri pada usaha menghindari jatuhnya produksi, bukan pada usaha memaksimalkan keuntungan.

Dari logika itulah kita dapat memahami mengapa anak jalanan tetap memilih bertahan di jalanan. Faktanya, tindakan opresif yang dilakukan oleh negara dan raja-raja jalanan telah menyebabkan anak jalanan terdorong ke dalam

ancaman subsistensi. Jadi boleh dikatakan bahwa motivasi perlawanan mereka yang mendasar adalah menyelamatkan diri dari kerawanan susbsitensinya. Karena itu, uang menjadi segala-galanya bagi mereka. Hanya dengan turun ke jalanan, keluarga dapat diselamatkan dari ancaman kelaparan pada hari itu juga. Maka jangan heran, sekeras apapun tindakan opresif yang dilakukan, akan tetap dilawan jika tindakan opresif menyebabkan krisis subsistensi dalam keluarganya.

## Kesimpulan

Perjuangan anak jalanan untuk tetap eksis di perkotaan hanyalah bagian dari sekumpulan cerita perjuangan orang-orang jalanan pada umumnya. Tidak terkecuali anak-anak jalanan di Makassar, dengan pengalaman dan keterbatasan sumber daya, mereka bertahan dengan cara memberontak yang sangat kecil peluangnya untuk mencapai tahap “merayakan kemenangan”. Pemberontakan dengan mengendap-ngendap (simbolik), praktik siasat yang terkadang frontal (fisik) menjadi cara untuk bertahan dan mempertahankan lahan ekonomi mereka. Untuk mempertahankan lahan ekonomi mereka, maka setidaknya harus berhadapan dengan negara di sisi lain dan dibagian lain mereka juga harus berhadapan dengan raja-raja jalanan.

Namun demikian, anak jalanan bukanlah aktor yang pasif, melainkan aktor yang rasional. Berangkat dari pengalaman-pengalaman yang mereka alami, maka mereka memiliki kapasitas untuk menimbang risiko-risiko yang akan mereka hadapi. Sehingga, banyak cara yang mereka lakukan untuk meminimalisir risiko seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menghadapi Satpol PP dengan preman jalanan atau Pak Ogah, strategi atau siasat mereka akan disesuaikan untuk menghadapi keduanya. Cara yang ditempuh adalah cara-cara yang meminimalisir risiko bagi keberlangsungan aktivitas ekonominya. Ini dilakukan misalnya dengan menggunakan senjata tajam seperti busur (*public transcript*) dan juga dilakukan dengan cara penggunaan senjata verbal (*hidden transcript*). Untuk menghadapi negara, anak jalanan menggunakan busur, mengumpat, penghindaran, alih profesi sampai pada praktik kolusi dengan aparat. Cara-cara ini lebih efektif dalam mengacaukan perencanaan negara yang menghendaki lenyapnya anak jalanan. Sementara itu, untuk menghadapi raja-raja jalanan, anak jalanan lebih memilih penghindaran (meninggalkan lahan garapan)

ketimbang bertahan dan konfrontasi. Di samping itu, anak jalanan mensiasati pemalak seperti preman dengan cara menyembunyikan uang mereka di tempat-tempat tertentu. Langkah ini meminimalisir kerugian anak jalanan, ketimbang membiarkan preman begitu saja mengambil uang mereka.

Lalu apa motivasi anak jalanan sesungguhnya? Jawabannya sederhana, bahwa uang adalah segala-galanya. Anak jalanan yang telah direhabilitasi, jika menemukan kondisinya berubah atau lebih banyak menghasilkan uang daripada aktivitasnya di jalanan selama ini, maka mereka akan meninggalkan pola kehidupan lamanya sebagai anak jalanan. Jika ternyata kondisinya tidak lebih baik dari penghasilan mereka di jalanan, maka dapat dipastikan bahwa mereka akan tetap kembali ke jalanan. Maka karena itu, kembalinya anak jalanan ke tempat semula sebagaimana biasanya dapat dijelaskan sebagai tindakan purposif atau tindakan yang rasional.

Secara umum tulisan ini berkesimpulan bahwa siasat anak jalanan dalam melawan opresif adalah didasarkan pada masalah subsistensi. Jadi motivasi yang mendasar anak jalanan adalah bagaimana mereka keluar dari krisis subsistensi. Ini cukup berdasar dikarenakan kondisi ekonomi anak jalanan begitu rapuh (miskin). Karena itu saya berasumsi bahwa kondisi ekonomi yang rapuh memiliki korelasi yang kuat dengan motivasi mereka untuk melakukan perlawanan.

Bahwa siasat sebagai jawaban atas tindakan opresif dilakukan semata-mata untuk mengamankan ekonomi keluarga. Karena tindakan opresif yang dilakukan oleh negara dan raja-raja jalanan pada dasarnya berakibat pada mengepul tidaknya dapur keluarga anak jalanan. Akibatnya, untuk menyelamatkan dapur keluarga tidak lain adalah dengan jalan melancarkan siasat. Model siasat bisa berbentuk *public transcript* dan *hidden transcript*.

#### Daftar Pustaka

Alkostar, A. (1984). Potret Kehidupan gelandangan: Kasus Ujung Pandang dan Yogyakarta. Dalam *Gelandangan: Pandangan Ilmuwan Sosial*. Jakarta: LP3ES.

Andari, S. (2013). *Solidaritas Sebagai Strategi Survival Anak Jalanan: Studi kasus di Lempuyangan Yogyakarta*. Disertasi, tidak diterbitkan. Yogyakarta: Jurusan Sosiologi FISIPOL UGM.

Barker, C. (2009). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Edisi Enam. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Beazley, H. (2003). The Construction and Protection of Individual and Collective Identities by Street Children and Youth in Indonesia. *Children, Youth and Environments* Vol. 13(1), 105-133.

Dewa, B.E.C. (2002). *Sosialisasi dan Siasat (Budaya) Anak Jalanan*. Tesis, tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Antropologi UGM.

Dinas Sosial Kota Makassar. *Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2013*.

Ertanto, K. (2000). "Anak Jalanan dan Subkultur: Sebuah Pemikiran Awal". Artikel dipresentasikan pada Diskusi dan Pemutaran Video "Subkultur Remaja: Underground, Skuter, PlayStation", KUNCI Cultural Studies Center-Lembaga Indonesia Perancis, Yogyakarta, 5 Mei 2000.

Ghofur, A. (2009). *Manusia Gerobak: Kajian Mengenai Taktik-Taktik Pemulung Jatinegara di Tengah Kemiskinan Kota*. Laporan Penelitian. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.

Harford, T. (2011). *Logika Hidup: Logika Ekonomi di Balik Seks, Kejahatan, Rasisme dan Politik Kantor*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Haryatmoko. (2010). *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jones, P. (2010). *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lewis, Oscar. (1988). *Kisah Lima Keluarga Telaah Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Pemerintah Kota Makassar. *Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar*.

Popkin, S.L. (1986). *Petani Rasional*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.

- Scott, J.C. (1990). *Domination and the Art of Resistance Hidden Transcripts*. New Haven and London: Yale University Press.
- (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- (2000). *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shanahan, F.P. (2003). "Streets versus Elites: Tensions, Trade-offs, and Treaties with Street Children in Accra, Ghana". *Children, Youth and Environments* Vol. 13 (1), 360-372.
- Shiraishi, S.S. (2009). *Pahlawan-Pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik*. Jakarta: Nalar.
- Surjono, G. (2000). *Konflik dalam Struktur dan Mobilitas Anak Jalanan: Studi Kasus Komunitas Anak Jalanan di Yogyakarta*. Tesis, tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Sosiologi UGM.
- Suyatna, H. (2011). "Revitalisasi Model Penanganan Anak Jalanan di Rumah Singgah". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 15 (1), 41-54.

## **Wawancara**

Pemerintah:

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.
- (2) Kepala Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.
- (3) Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Makassar.

Anak Jalanan & Orang-Orang Jalanan (*semua nama samaran*):

- (1) Aco, 16 tahun.
- (2) Bogel, 11 tahun.
- (3) Tanto, 14 tahun.
- (4) Adit, 8 tahun.
- (5) Cidu, 12 tahun.
- (6) Boy, 15 tahun.
- (7) Lukman, 16 tahun.
- (8) Bunda Mita, 40-an tahun.

